



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 385 /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG PERIODE
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, perlu dilakukan evaluasi kinerja keuangan Perangkat Daerah melalui pengukuran indikator kinerja keuangan Perangkat Daerah pada periode Triwulan II Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan keputusan rapat Tim Penilai telah ditentukan hasil akhir penilaian Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 21 Agustus 2026, perlu menetapkan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Kategori I, meliputi:
 1. Dinas;
 2. Badan;
 3. Inspektorat;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
 5. Rumah Sakit Umum Daerah.
 - b. Kategori II, meliputi Kecamatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 September 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABAG	
KASUBID	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KASIKASAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/385 /KUM/2026
TANGGAL 1 September 2026

DAFTAR HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG PERIODE TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026

KATEGORI I

NO	NAMA SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN								
				DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)					
1.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Nilai	88,18	87,73	100,00	49,00	100,00	85,69	100%	85,69	1	Baik
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	17,64	30,71	15,00	7,35	15,00					
		Nilai Aspek	88,18	84,18								
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Nilai	84,75	79,88	100,00	67,96	99,57	85,04	100%	85,04	2	Baik
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	16,95	27,96	15,00	10,19	14,94					
		Nilai Aspek	84,75	86,86								
3.	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Nilai	88,82	81,00	100,00	80,80	73,39	84,24	100%	84,24	3	Baik
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	17,76	28,35	15,00	12,12	11,01					
		Nilai Aspek	88,82	83,80								
4.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Nilai	100,00	77,38	100,00	50,00	97,36	84,19	100%	84,19	4	Baik
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	20,00	27,08	15,00	7,50	14,60					
		Nilai Aspek	100,00	81,19								

NO	NAMA SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN								
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGELOLAAN UP/GU (15%)					
5.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Nilai	85,98	69,08	100,00	75,43	100,00	82,69	100%	82,69	5	Baik
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	17,20	24,18	15,00	11,31	15,00					
		Nilai Aspek	85,98	86,13								
6.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Nilai	82,30	72,28	100,00	67,13	100,00	81,83	100%	81,83	6	Baik
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	16,46	25,30	15,00	10,07	15,00					
		Nilai Aspek	82,30	84,85								
7.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Nilai	87,63	81,46	100,00	50,29	87,50	81,71	100%	81,71	7	Baik
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	17,53	28,51	15,00	7,54	13,13					
		Nilai Aspek	87,63	79,81								
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Nilai	87,97	69,45	100,00	65,13	100,00	81,67	100%	81,67	8	Baik
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	17,59	24,31	15,00	9,77	15,00					
		Nilai Aspek	87,97	83,65								
9.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Nilai	87,02	69,86	100,00	56,25	100,00	80,29	100%	80,29	9	Baik
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	17,40	24,45	15,00	8,44	15,00					
		Nilai Aspek	87,02	81,53								
10.	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Nilai	83,65	61,35	100,00	77,49	100,00	79,83	100%	79,83	10	Cukup
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	16,73	21,47	15,00	11,62	15,00					
		Nilai Aspek	83,65	84,71								

NO	NAMA SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN								
				DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)					
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Nilai	85,01	74,12	100,00	60,57	83,33	79,53	100%	79,53	11	Cukup
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	17,00	25,94	15,00	9,09	12,50					
		Nilai Aspek	85,01	79,51								
12.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Nilai	79,07	62,64	100,00	95,74	0,00	67,10	85%	78,94	12	Cukup
		Bobot	20%	35%	15%	15%	0%					
		Nilai Akhir	15,81	21,92	15,00	14,36	0,00					
		Nilai Aspek	79,07	86,13								
13.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Nilai	82,89	59,49	100,00	75,62	100,00	78,74	100%	78,74	13	Cukup
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	16,58	20,82	15,00	11,34	15,00					
		Nilai Aspek	82,89	83,78								
14.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Nilai	79,34	50,92	100,00	100,00	100,00	78,69	100%	78,69	14	Cukup
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	15,87	17,82	15,00	15,00	15,00					
		Nilai Aspek	79,34	87,73								
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Nilai	80,15	65,16	100,00	84,00	75,00	77,69	100%	77,69	15	Cukup
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	16,03	22,81	15,00	12,60	11,25					
		Nilai Aspek	80,15	81,04								
16.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Nilai	85,66	60,75	100,00	93,52	66,67	77,42	100%	77,42	16	Cukup
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	17,13	21,26	15,00	14,03	10,00					
		Nilai Aspek	85,66	80,23								

NO	NAMA SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN								
				DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)					
23.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Nilai	76,27	56,71	100,00	26,32	100,00	69,05	100%	69,05	23	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	15,25	19,85	15,00	3,95	15,00					
		Nilai Aspek	76,27	70,76								
24.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Nilai	72,31	26,98	100,00	96,00	80,00	65,30	100%	65,30	24	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	14,46	9,44	15,00	14,40	12,00					
		Nilai Aspek	72,31	75,74								
25.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Nilai	75,41	32,28	100,00	53,05	100,00	64,33	100%	64,33	25	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	15,08	11,30	15,00	7,96	15,00					
		Nilai Aspek	75,41	71,33								
26.	RSUD H. Badaruddin Kasim	Nilai	69,81	18,55	100,00	37,50	-	41,08	85%	48,33	26	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	0%					
		Nilai Akhir	13,96	6,49	15,00	5,63	-					
		Nilai Aspek	69,81	52,02								

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABAG	
KABID/KASUBAG/KE	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISIKABAN	

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 395 /KUM/2026
TANGGAL 1 September 2026

DAFTAR HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG PERIODE TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026

KATEGORI II

NO	NAMA SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN								
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGELOLAAN UP/GU (15%)					
1.	Kecamatan Muara Uya	Nilai	100,00	88,46	100,00	89,09	66,67	89,33	100%	89,33	1	Baik
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	20,00	30,96	15,00	13,36	10,00					
		Nilai Aspek	100,00	86,06								
2.	Kecamatan Jaro	Nilai	88,99	88,79	100,00	68,75	100,00	89,19	100%	89,19	2	Baik
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	17,80	31,08	15,00	10,31	15,00					
		Nilai Aspek	88,99	89,39								
3.	Kecamatan Upau	Nilai	87,70	83,98	100,00	80,93	100,00	89,07	100%	89,07	3	Baik
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	17,54	29,39	15,00	12,14	15,00					
		Nilai Aspek	87,70	91,23								
4.	Kecamatan Kelua	Nilai	87,38	85,10	100,00	75,86	100,00	88,64	100%	88,64	4	Baik
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	17,48	29,78	15,00	11,38	15,00					
		Nilai Aspek	87,38	90,24								

NO	NAMA SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN								
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGELOLAAN UP/GU (15%)					
11.	Kecamatan Banua Lawas	Nilai	86,18	78,92	100,00	34,78	100,00	80,07	100%	80,07	11	Baik
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	17,24	27,62	15,00	5,22	15,00					
		Nilai Aspek	86,18	78,42								
12.	Kecamatan Tanta	Nilai	87,03	80,85	100,00	19,35	100,00	78,61	100%	78,61	12	Cukup
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%					
		Nilai Akhir	17,41	28,30	15,00	2,90	15,00					
		Nilai Aspek	87,03	75,05								

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
KABID.	
KASUBKAS	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI